

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGATASI PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN TANGERANG

Nia Qurrotul 'Ain

Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten]
Email : 6670190064@untirta.ac.id

ABSTRACT

Nia Qurrotul'ain, 6670190064, Citizens Participation in Overcoming School Dropouts in Tangerang, Dr. Elly Nurlia, M.Si., Government Science, Faculty of Social and Politic Science, Sultan Ageng Tirtayasa University, 2024. This article discusses community participation in overcoming school dropouts in the District. Tangerang. Tangerang Regency occupies the highest position in Banten Province regarding the number of children out of school. This makes the government in Kab. Tangerang solved the problem by creating a program and participating in the program. In this research, researchers used qualitative methods with a case study approach with community participation theory by Sherry Arnstein. The results of this research show that the Pakades Program is included in the moderate participation category where the community has the opportunity to convey their aspirations as material for consideration by the government in determining policy, but the community's authority to participate in formulating policy is not large. The role of the school committee is included in the high category where the community has influence on the decision-making process. Community participation (poor/vulnerable community groups) has entered the space for determining the process, results and impact of policies by implementing partnerships, namely that the community has been able to negotiate with "power holders." " in an equal position, delegation of power means that the community has been able to direct policy because the decision-making space has been "controlled".

Keywords : *Citizens Participation, Dropout, Tangerang.*

I. PENDAHULUAN

Provinsi Banten memiliki jumlah angka putus sekolah yang masih sangat tinggi dengan persentase 50%, hal ini juga didukung dengan data BPS yaitu, anak yang berumur 16 hingga 18 tahun dengan jumlah 312.000 atau lebih anak di Provinsi Banten tidak bersekolah (BantenNews,2020). Pendidikan yang tidak merata di Banten memiliki beberapa faktor penyebab, salah satunya yaitu adanya ketimpangan perekonomian di daerah rural dan urban (Naranjo et al., 2016). Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang berada di Banten salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan (Naranjo et al., 2016). Dari laporan berita Wartakotalive.com (Panduwinata, 2021) salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten yaitu, menggratiskan pendidikan di sekolah menengah dari tahun 2017 (Panduwinata, 2021).

Berdasarkan data jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang berada di posisi tertinggi dengan jumlah kasus 29.281 anak, diantara Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Banten (Kemendikbud, 2021). Pemerintah Kabupaten Tangerang berupaya membuat program yang diperuntukkan kepada anak-anak di sekolah agar mereka merasa nyaman dan senang untuk

bersekolah. Program ini dinamakan Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah kabupaten untuk mengembalikan ruh dari ajaran Ki Hadjar Dewantara. Tujuan GSM ini untuk Mempromosikan dan membangun kesadaran guru-guru, Kepala Sekolah dan Pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun sekolah sebagai rumah kedua bagi anak yaitu sekolah sebagai tempat menyenangkan dan manusiawi untuk belajar, tempat mengembangkan potensi yang dimiliki anak (akademis maupun non akademis) agar memiliki bekal keterampilan hidup di masa mendatang.

Peran serta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah. Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat sekolah. Amanat rakyat dalam

Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Identifikasi masalah dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Mengatasi Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang adalah tingginya angka putus sekolah Kabupaten Tangerang dan faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan terhadap perencanaan pembangunan pendidikan dan implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan masih belum terpenuhi dengan baik, dan pemerintah membuat beberapa program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi angka putus sekolah masih tinggi sehingga memungkinkan permasalahan ini berasal dari aspek lain yang masih belum terselesaikan yaitu, partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengatasi putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu bahan penelitian lain yang akan meneliti mengenai topik yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang lebih luas baik untuk penulis maupun untuk mahasiswa lainnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pemikiran dari sudut pandang yang berbeda dan berguna untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Sosial dalam Mengatasi Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian merupakan salah satu proses yang penting pada penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna secara menyeluruh dalam suatu penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu aspek melalui keyakinan, sikap, dan perilaku manusia. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian pada objek yang terjadi secara apa adanya, sehingga hasil penelitian tidak dapat dimanipulasi. Dalam studi kasus, memiliki ciri utama yaitu memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut (Creswell, 2014).

III. PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menangani Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang antarlain:

1. Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (PAKADES)

Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (PAKADES) adalah program pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk menjamin pengentasan wajib belajar 12 tahun dan dalam rangka memberdayakan masyarakat desa melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup program paket A,B, dan C. Tujuan pendidikan kesetaraan dengan slogan “Menjangkau yang tidak terjangkau” berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal dengan berbagai alasan. Pendidikan kesetaraan selain diberikan ilmu pengetahuan juga diberikan materi vokasional atau pendidikan kecakapan hidup (*life skill*), serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.

Tabel 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Program PAKADES

N o.	Tahapan	Bentuk Partisipasi	Pihak yang Terlibat
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Pengambilan Keputusan	Dalam perencanaan program ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menggunakan metode <i>top down</i> atau dari atas kebawah.	Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan DPMPD Kabupaten Tangerang
2	Pelaksanaan Kegiatan	1. Pendataan Peserta Didik 2. Pembentukan Kelompok Belajar 3. Kegiatan Pembelajaran	Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Anak Putus Sekolah (Masyarakat)
3	Pantauan dan Evaluasi	Masyarakat mendapatkan perkembangan atas informasi keberlanjutan	Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

No.	Tahapan	Bentuk Partisipasi	Pihak yang Terlibat
		dari progress pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.	
4	Pemanfaatan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas layanan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Peningkatan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat tidak bersekolah, masyarakat putus sekolah, dan masyarakat beresiko putus sekolah. Percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang. 	Masyarakat Kabupaten Tangerang

2. Komite Sekolah

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 25 Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri, yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam pengertian lain disebutkan Komite sekolah adalah institusi yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan sekolah, maupun lembaga pemerintah lainnya. Walaupun komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing,

namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama. Komite Sekolah mempunyai peran (Suryadi, 2003) yaitu Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, Mediator (Mediator Agency) antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Sebagai fungsi mediator, orangtua harus datang ke sekolah karena diundang dengan menggunakan surat undangan resmi.

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Komite Sekolah

No.	Tahapan	Bentuk Partisipasi	Pihak yang Terlibat
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Pengambilan Keputusan	Pembuatan koordinator kelas dari masing-masing perwakilan wali murid di tiap kelas. Pembuatan tim komite sekolah (contohnya seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara).	Wali Murid/Orangtua Murid
2	Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan pertemuan rutin dengan komite sekolah Mengadakan rapat pleno dengan anggota komite sekolah 	Kepala Sekolah, Guru, dan Anggota Komite Sekolah
3	Pemantauan dan Evaluasi	Mengetahui perkembangan serta program-program yang dilaksanakan oleh sekolah melalui pelaksanaan rapat rutin	Kepala Sekolah, Guru, dan Anggota Komite Sekolah

4	Pemanfaatan Hasil	Sekolah mendapatkan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan murid di sekolah.	Warga sekolah
---	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------

3. Taman Baca

Taman baca yang didirikan di bawah jembatan *Fly Over*, Balaraja merupakan salah satu bentuk upaya dari masyarakat untuk meningkatkan minat baca anak-anak setempat. Kini *Fly Over* Balaraja tidak hanya berfungsi sebagai jalan yang mengurangi kemacetan sebagai fungsi teknisnya, tetapi juga untuk sarana belajar dan berdiskusi.

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat Taman Baca

No .	Tahapan	Bentuk Partisipasi	Pihak yang Terlibat
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Pengambilan Keputusan	Perencanaan membuat taman baca direncanakan oleh pemuda setempat dan swadaya masyarakat kemudian untuk pembangunannya dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.	Pemuda, swadaya masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
2	Pelaksanaan Kegiatan	4. Taman baca atau perpustakaan 5. Taman bermain anak-anak 6. Penggalangan dana untuk membangun taman baca atau bantuan sosial. 7. Mengadakan	Volunteer, Masyarakat sekitar, Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang

No .	Tahapan	Bentuk Partisipasi	Pihak yang Terlibat
		an acara-acara seperti mewarnai, buka bersama, acara keagamaan, dan acara lainnya.	
3	Pemantauan dan Evaluasi	Masyarakat mendapatkan perkembangan atas informasi keberlanjutan dari progress pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.	Masyarakat
4	Pemanfaatan Hasil	1. Meningkatkan minat membaca serta budaya literasi mulai dari anak-anak hingga remaja 2. Memiliki taman bermain agar anak-anak bisa bersosialisasi dan bermain dengan teman sebaya. 3. Memiliki tempat berdiskusi serta penggalangan dana kemanusiaan	Masyarakat

No	Tahapan	Bentuk Partisipasi	Pihak yang Terlibat
		n.	

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dilapangan yang dikumpulkan selama penelitian serta berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan mengenai “Partisipasi Masyarakat dalam Mengatasi Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang” adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kab. Tangerang berupaya menyelesaikan permasalahan putus sekolah dengan membuat Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (PAKADES), dimana dalam perencanaan dan pembuatan program ini pemerintah Kab. Tangerang tidak melibatkan masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaan program ini pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak yang perlu untuk terlibat dalam program ini (Contohnya: Perangkat Desa, RW, RT, dan masyarakat). Jika dilihat dari tangga partisipasi menurut Arnstein (1971), Program Pakades termasuk dalam kategori partisipasi sedang dimana masyarakat mempunyai peluang dalam menyampaikan aspirasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan, akan tetapi kewenangan masyarakat dalam ikut merumuskan kebijakan tidaklah besar. Anak tangga berikutnya adalah kemitraan dimana penyelenggara pemerintah daerah mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan organisasi masyarakat.
2. Komite sekolah merupakan salah satu lembaga masyarakat yang mewakili orangtua/ wali murid yang berada di lingkungan sekolah. Perannya sangat penting dalam pemberi pertimbangan, pendukung, pendorong, dan juga mediator dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ataupun permasalahan yang ada di sekolah. Berdasarkan teori Arnstein (1971) dapat diketahui bahwa, peran serta komite sekolah termasuk dalam kategori tinggi dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (*citizen control*) partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin

masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu.

3. Taman baca merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas wawasan, belajar, dan membaca masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat juga dapat melakukan banyak hal-hal positif taman baca fly over ini, baik dalam bentuk pembelajaran maupun kemanusiaan. Berdasarkan pisau analisa teori Arnstein, maka dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada dibentuknya taman baca ini termasuk partisipasi tingkat tinggi, karena kelompok masyarakat lemah dapat menentukan kebijakan baik dalam pengambilan keputusan hingga pelaksanaannya.

Secara keseluruhan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Putus Sekolah Di Kabupaten Tangerang berada pada tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tanda partisipasi (*degree of Tokenism*) dimana partisipasi masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program, guna terciptanya suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

1. Saran dari penulis adalah Melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dan pemerintah desa, melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan komunikasi tersebut diharapkan masyarakat dapat merubah pola pikir agar tidak befikir kuno dan sempit. Misalnya di sekolah harus lebih meningkatkan kegiatan mensosialisasi kepada orang tua siswa tentang adanya dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah.
2. Perlu membentuk lebih banyak lembaga yang berkaitan dengan isu pendidikan, karena di Kab. Tangerang sendiri sulit untuk menemukan lembaga yang mengatasi permasalahan pendidikan.
3. Selain adanya program melanjutkan sekolah, pemerintah juga perlu untuk membuat program yang mengasah kemampuan life skill anak yang putus sekolah, karena kemampuan ini sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk mencari pekerjaan.
4. Setiap sekolah perlu membuat administrasi yang rapih dan tertata terutama yang berkaitan dengan siswa-siswi yang masih aktif bersekolah, pindah sekolah, dan tidak melanjutkan. Hal ini diperlukan agar dinas terkait dapat mengetahui berapa banyak anak yang putus sekolah di masing-masing instansi pendidikan dan mencari jalan keluarnya.
5. Setiap sekolah perlu untuk menerapkan Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) sesuai dengan peraturan Bupati Tangerang. Hal tersebut bertujuan

agar siswa-siswi yang masih bersekolah merasakan kenyamanan seperti di rumah dan agar siswa-siswi melanjutkan program wajib belajar sesuai dengan aturan Menteri Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Aini, Anik Kurroti. (2020). Fenomena Sosial Anak Putus Sekolah di Daerah Banten Ditinjau dari Perspektif Sosiologi. <https://www.bantennews.co.id/fenomena-sosial-anak-putus-sekolah-di-daerah-banten-ditinjau-dari-perspektif-sosiologi/>
- Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tangerang Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMAN, SMKN dan MAN di Kabupaten Tangerang. *87*(1,2), 149–200.
- Arnstein, Sherry R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4 (July 1969), pp. 216-224.
- Bradley, Mollie. (2020). Peningkatan Angka Putus Sekolah di Pedesaan China. www.ballardbrief.org.
- Budi Lestari, A. Y., Kurniawan, F., & Bayu Ardi, R. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, *4*(2), 299. <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.24470>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design* (4th Ed.). Pustaka Pelajar.
- Hikmah, L., Quraisy, H., & Arifin, J. (2015). Kemiskinan dan Putus Sekolah. *Journal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, *4*(1), 1–10.
- KEMENPPPA. (2019). Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan dan Aparat penegak Hukum). 1–84.
- Merlion, Mukhamil Irsyad. (2017). Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, *4*(1).
- Mubin, F. (2020). Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *3*, 268–279.
- Naranjo, J., Fuad, H., Hakim, Z., Panchadria, P. A., Robbi, M. S., Yulianti, Y., Susanti, E., Sholeh, M., Teuku Fadjar Shadek, R. S., Kamil Arif, I., Gunadhi, E., Partono, P., Sampieri, R. H., & Pariyatin, Y. (2016). Ketimpangan Pendidikan di Wilayah Urban dan Rural Provinsi Banten Tahun 2011-2014. *Jurnal Algoritma*, *12*(1), 579–587.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, *4*(2), 72. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581>
- Normina. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, *14*(6), 71-85.
- Octavianti, F. S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus : Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan bagi Pelajar SMA). *1945*(1), 30–37.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, *32*(1), 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>
- Rosyida, Isma. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, *05*(01), 51-70.
- Soetrisnaadisendjaja, D., & Sari, N. (2019). Fenomena Anak Putus Sekolah di Kawasan Industri Kota Cilegon. *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika*, *5*(2), 89. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v5i2.7383>
- Sofya, R., Siwi, M. K., & Oknaryana, O. (2018). Kondisi Sosial Ekonomi Siswa Putus Sekolah. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*, *8*(2), 90. <https://doi.org/10.24036/011024540>
- Sugardha, I. A. (2018). Upaya Ke Arah Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka; Pendekatan Kebijakan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *25*(2), 252–263. <https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15640>
- Suryana, N. (2019). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Sengkarut Kepentingan Aktor Keamanan (Tinjauan Atas Dinamika Perumusan UU Keamanan Nasional). *Core.Ac.Uk*, *04*(02), 145–159. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, *13*(1), 1. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22890>

Tamba, E. M., Krisnani, H., & Gutama, A. S. (2014). Pelayanan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah. *Share: Social Work Journal*, 4(2), 218–222. <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13077>

Thoyibi, M. (2016). *Children's rights-based approach in education: Experiences from scattered initiatives*. 18–22.

Viviansari, D. B. (2019). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia (*State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker's Children in Malaysia*). 10(3), 179–194.